

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Perkembangan Inflasi Daerah Pada Triwulan I 2025, Pada Maret 2025, Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 1,39% (mtm), pada Februari 2025, Riau mengalami deflasi sebesar -0,50% (mtm), dan pada bulan Januari Provinsi Riau juga mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm). Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tembilahan (2,66%; mtm), diikuti Kab. Kampar (1,62%; mtm), Kota Dumai (1,33%; mtm) dan Kota Pekanbaru (1,17%; mtm). Secara kumulatif (Jan-Mar 2025), perkembangan inflasi tahun kalender Riau berada pada level 0,86% (ytd), atau secara tahunan menjadi 0,68% (yoy). Dengan demikian, realisasi inflasi Riau masih berada di bawah target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi terutama didorong oleh inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama komoditas tarif listrik, kentang, daging ayam ras, ikan serai dan udang basah. Di sisi lain, inflasi yang lebih lanjut dapat ditahan oleh deflasi kelompok Transportasi, khususnya tarif angkutan udara dan tarif parkir.

- Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT tercatat mengalami inflasi sebesar 9,81% (mtm), berbalik arah dari bulan sebelumnya dengan deflasi sebesar 3,30% (mtm). Deflasi pada kelompok ini memberikan andil terbesar sekitar 1,14% terhadap inflasi Riau secara umum. Berdasarkan komoditas, inflasi terutama bersumber dari tarif listrik, seiring dengan berakhirnya diskon listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) yang memiliki daya 450 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA pada bulan Januari dan Februari 2025 (Keputusan Menteri ESDM No. 348.K/TL.01/MEM.L/2024 terkait pemberian diskon 50% tarif listrik). Normalisasi tarif listrik pada Maret 2025 terhitung untuk pelanggan pasca bayar untuk pemakaian listrik bulan Februari 2025. Secara tahunan, kelompok ini mengalami deflasi sebesar 4,41% (yoy) dengan andil sebesar 0,60% terhadap inflasi tahunan Riau. Deflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas tarif listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) seiring dengan tarif *adjustment* PLN triwulan I 2025 dan penyesuaian harga gas elpiji rumah tangga;
- Selain itu, inflasi turut didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm), berbalik arah dari realisasi Februari 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,87% (mtm). Inflasi pada kelompok ini memberikan andil sebesar 0,10% terhadap inflasi Riau secara umum. Berdasarkan komoditas, inflasi utamanya disumbang oleh komoditas kentang, daging ayam ras, ikan serai dan udang basah, dipengaruhi oleh peningkatan permintaan masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri, serta cuaca (curah hujan eskترم) yang kurang kondusif untuk aktivitas nelayan. Di sisi lain, inflasi yang lebih lanjut dapat ditahan oleh deflasi komoditas cabai merah, cabai rawit, dan ayam hidup seiring dengan: (i) peningkatan pasokan cabai merah dan cabai rawit dari daerah sentra terutama Aceh, serta (ii) terjaganya pasokan ayam hidup dari produsen di tengah penurunan harga pakan karena puncak panen jagung di bulan Maret 2025. Secara tahunan, kelompok ini mengalami inflasi yang relatif terbatas sebesar 0,03% (yoy) dengan andil 0,01%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng dan beras. Peningkatan harga komoditas tersebut seiring dengan: (i) kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok yang diberlakukan pada 1 Januari 2025 sesuai dengan PMK 97/2024 HJE Rokok dengan rerata kenaikan sebesar 9,53% dan PMK 96/2024 HJE Rokok Elektrik dengan rerata kenaikan sebesar 11,34% dan Harga Pengolahan Tembakau mengalami kenaikan

sebesar 6,19% (ii) peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita pada Agustus 2025, serta (iii) relaksasi HET Beras pada Mei 2024 dan penyesuaian HPP GKP, GKG, dan Beras pada Januari 2025.

- Di sisi lain, inflasi yang lanjut dapat ditahan oleh kelompok Transportasi. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,44% (mtm) sehingga memberikan andil -0,06% terhadap inflasi Riau secara umum. Deflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh tarif angkutan udara dan tarif parkir yang mengalami penurunan harga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah memberikan diskon tarif angkutan udara sekitar 13% - 14% untuk penerbangan domestik selama periode mudik lebaran Idulfitri (25 Maret - 7 April 2025), serta kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menurunkan tarif parkir, secara tahunan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,12% (yoy) dengan andil 0,14%. Inflasi kelompok ini dominan disumbang oleh komoditas mobil, sepeda motor, perbaikan ringan kendaraan, dan tarif jalan tol. Peningkatan harga mobil dan sepeda motor dipengaruhi oleh penyesuaian harga tahunan oleh produsen seiring kenaikan harga bahan baku, sedangkan biaya perbaikan kendaraan mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik lebaran. Terakhir, kenaikan tarif tol terjadi pada Januari 2025 untuk tol Pekanbaru - Bangkinang.

b. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok selama triwulan I Tahun 2025 (Januari - Maret 2025) ada beberapa komoditi yang mengalami fluktuasi harga. Berikut hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar Tradisional di Provinsi Riau

◦ Beras

Harga beras di Provinsi Riau pada triwulan I sedikit mengalami kenaikan pada bulan Maret. Adapun harga beras premium pada bulan Januari rata-rata Rp. 16.700/kg, namun pada bulan Maret naik Rp.100,-/kg menjadi Rp. 16.800. kenaikan disebabkan pada bulan Maret HBKN Puasa. Harga beras medium pada triwulan I 2025 naik dibanding triwulan IV menjadi Rp.15.600/kg, dan harga beras SPHP Rp. 13.300/kg.

◦ Gula Pasir

Pada triwulan I 2025 harga gula di Provinsi Riau mengalami kenaikan di harga Rp. 18.000 s/d Rp.19.000 per kilogram. Hal ini disebabkan kenaikan harga gula ditingkat produsen dan tingginya permintaan menjelang HBKN puasa dan Idul Fitri.

◦ Minyak Goreng

Minyak goreng yang dipantau adalah minyak goreng kemasan, minyak goreng curah dan Minyakita. Pada Triwulan I tahun 2025 harga minyak goreng kemasan di Provinsi Riau mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya harga di tingkat produsen terutama minyak goreng premium. Harga minyak goreng kemasan rata-rata Rp.20.000,- hingga Rp.21.000 per liter. Harga Minyakita rata-rata harga berkisar pada Rp.17.000,- dan minyak goreng curah mengalami kenaikan harga rata-rata menjadi Rp.18.000 per liter.

◦ Daging Ayam

Pada triwulan I tahun 2025 harga daging ayam mengalami kenaikan harga pada bulan

Januari di kisaran harga Rp.38.000 s/d Rp. 40.000 per kilogram namun menjelang HBKN puasa harga ayam mengalami penurunan dengan harga rata-rata Rp. 33.000,- s/d Rp. 35.000,- per kilogram.

- Telur Ayam Ras

Pada triwulan I harga telur ayam ras stabil dengan rata-rata harga Rp. 27.000 s/d Rp. 28.000 per kilogram, namun mengalami penurunan harga di bulan Maret Rp. 26.500 per kilogram.

- Cabe Merah Keriting

Harga cabe merah keriting triwulan I tahun 2025 masih mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan harga dari triwulan IV tahun 2024 menjadi Rp. 60.000,- s/d Rp.64.000 per kilogram.

- Bawang Merah

Bawang merah pada triwulan I tahun 2025 juga mengalami penurunan dibanding triwulan IV tahun 2024, berkisar antara Rp.38.000 - Rp.41.000/kg.

- Bawang Putih

Harga bawang putih pada triwulan I mengalami kenaikan dengan harga berkisar antara Rp.42.000 - Rp.43.000/kg. Kenaikan ini karena importir bawang putih masih belum melakukan realisasi impornya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Komoditas yang mengalami kenaikan harga terjadi hampir pada komoditas beras, daging ayam ras, gula pasir, minyak goreng dan bawang putih. Kenaikan beberapa komoditas disebabkan terjadinya peningkatan permintaan menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri tahun 2025;
2. Adanya faktor gangguan cuaca, dimana pada bulan Januari hingga Maret curah hujan cukup tinggi hingga menyebabkan longsor di jalur penghubung dari daerah produsen. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya kelancaran arus distribusi barang dari daerah produsen;
3. Upaya peningkatan produksi padi masih terkendala persoalan mendasar yaitu pengairan belum optimal, sebagian besar lahan sawah tadah hujan, perubahan iklim ekstrim sehingga dampak el-nino berlanjut sehingga mengakibatkan banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), biaya produksi meningkat, harga jual

menurun, akses petani terhadap penyuluhan dan pembiayaan terbatas sehingga animo petani menjadi turun dan berakibat luas tanam dan panen semakin turun.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Mendirikan BUMD pangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor Ahu-0005537.Ah.01.01.Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Riau Pangan Bertuah;
- b. Operasi Pasar Minyakita yang dilakukan di 57 titik di pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru bekerjasama dengan produsen Minyakita PT. Intibenua Perkasa dan IDFood PT. Rajawali Nusaindo;
- c. Melakukan sidak pasar dan gudang distributor dalam upaya monitoring terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. Melakukan Operasi Pasar Murah di antaranya di kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Meranti dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok selama menghadapi HBKN Puasa dan Idul Fitri tahun 2025 bersama BUMD Pangan;
- e. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bekerjasama dengan Terlaksananya operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) diutamakan pada kecamatan Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga pangan;
- f. Percepatan Pengembangan Kios Pangan, diantaranya dua Kios Pangan yang berada di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai;
- g. Dalam rangka upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura khususnya Cabai telah dilakukan Bantuan Benih dan Saprodi pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai seluas 200 Ha (APBD). Realisasi pelaksanaan kegiatan masih pada tahap verifikasi calon petani calon lokasi (CPCL) kelompok penerima bantuan dan Kegiatan Edukasi Gerakan Tanam Cabai di Provinsi Riau melalui pembagian benih cabai sebanyak 21.000 polybag di 5 Kabupaten/Kota (Pekanbaru, Dumai, Indragiri hilir, Kampar dan Kuantan Singingi. Kegiatan ini dalam rangka mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga khususnya cabai Secara simbolis Gerakan ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 Februari 2025;
- h. Dalam rangka stabilisasi harga pangan, meningkatkan pasokan lokal, dan membantu memperkenalkan serta memasarkan hasil produksi petani lokal, dilakukan pelaksanaan Pasar Tani di Kota Pekanbaru sebanyak 5 kali, kerja sama dengan BI dan akan dilaksanakan pada Bulan Mei - Desember 2025;
- i. Mengaktifkan Gerai Hortimart setiap hari dalam rangka memfasilitasi promosi dan penjualan produk pangan dari petani, seperti penjualan beras lokal dan beras Bulog, cabai merah, bawang merah, bawang putih, buah, sayuran serta produk olahan hortikultura dengan harga di bawah harga pasar (untuk komoditas hortikultura rata rata 7,5% lebih murah dari harga pasar) sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas harga pasar komoditas tertentu penyumbang inflasi;
- j. Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) melalui dana APBN Direktorat Jenderal Hortikultura di 10 kabupaten se Provinsi Riau dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025. Realisasi pelaksanaan kegiatan masih pada tahap verifikasi calon petani calon lokasi (CPCL) kelompok penerima bantuan;
- k. Monitoring Harga dan Pasokan Rutin secara Harian dan Mingguan oleh Petugas PIP, sehingga dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan penentuan harga pada saat penyelenggaraan Pasar Tani;

Melakukan Pengawasan dan Pendampingan dalam pengembangan kawasan cabai yang

l.

dilaksanakan disetiap kesempatan berkunjung ke kelompok tani di kabupaten/kota maupun secara online.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan, Bersama mengawasi distributor penyuplai bahan pangan strategis dalam hal ketersediaan bahan pangan strategis dan harga bahan pangan strategis serta membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- b. Penyusunan Database Ketersediaan Pangan. Tersedianya database ketersediaan pangan untuk mengetahui daerah yang mengalami surplus/defisit ketersediaan pangan strategis;
- c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Tersedianya CPPD untuk menjaga ketersediaan beras jika terjadi fluktuasi harga beras, defisit pasokan beras, gagal panen, serta terjadinya bencana alam;
- d. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Tersedianya database SKPG untuk mengetahui daerah yang mengalami rawan pangan dan aman pangan dalam hal ketersediaan pangan;
- e. Pola Pangan Harapan (PPH), tersampainya sosialisasi konsumsi bahan makanan dengan cara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat serta untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi masyarakat di Provinsi Riau;
- f. Prognosa Ketersediaan Pangan. Tersedianya database prognosa ketersediaan pangan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan pangan strategis di bulan/tahun yang akan datang;
- g. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis. Tersedianya informasi mengenai mengenai produksi, stok, dan harga pangan strategis;
- h. Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website. Tersedianya harga di tingkat konsumen, produsen, grosir, dan eceran di 3 pasar utama;
- i. Penguatan kualitas statistik harga bahan makanan. Sinergi pencatatan harga antara Dinas Perindagkop, Dinas PTPH, Polda Riau, Bank Indonesia dan BPS Provinsi Riau untuk bersama mengawasi harga pangan strategis;
- j. Pengembangan kawasan cabai memang akan berpengaruh langsung terhadap produksi dan produktivitas cabai dalam rangka pengendalian inflasi, karena kita ketahui, Provinsi Riau hanya mampu menyediakan cabai merah sebanyak 25-30%, sehingga penting bagi Provinsi Riau menambah anggaran untuk pengembangan kawasan cabai;
- k. Melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2025, dialokasikan anggaran Pengembangan Kawasan Cabai seluas 200 Ha dan Gerakan Tanam Cabai sebanyak 21.000 batang, sehingga diperkirakan akan mampu meningkatkan produksi cabai sebanyak 1.210 Ton (produktivitas 6 ton/Ha).

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Anggaran untuk memfasilitasi pengembangan kawasan Cabai di Provinsi Riau perlu

ditingkatkan;

- b. Anggaran untuk memfasilitasi Pasar Tani di Provinsi Riau perlu ditingkatkan, karena kegiatan ini sejalan dan melengkapi Kegiatan Pasar Murah yang ditaja oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
- c. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Diharapkan para Bank Indonesia, BUMD Pangan Kota Pekanbaru, BUMD Pangan Provinsi Riau , Bulog dan ID Food ikut berpartisipasi dalam penyediaan beraneka bahan pokok srategis dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM);
- d. Melakukan pemantauan harga setiap hari dan memeriksa rantai distribusi bahan pangan yang mengalami kenaikan serta mencari solusi terhadap kenaikan harga yang terjadi.